

Pendampingan WALHI Terhadap Kelompok Perempuan Beremis dalam Menolak Tambang Pasir Besi di Desa Pasar Seluma

Bella Febriyanti*, Hajar Gelis Pramudyasmono, Ika Pasca Himawati

Universitas Bengkulu, Indonesia

*bellafebriyanti43@gmail.com

Abstract

This research is motivated by social and ecological conflicts resulting from the planned iron sand mining by PT Faminglevto Bakti Abadi (FBA) in Pasar Seluma Village, Bengkulu, which threatens the coastal ecosystem and the livelihoods of the community, particularly the women's mussel collectors. This study aims to analyze the assistance provided by the Indonesian Forum for the Environment (WALHI) Bengkulu to the Women's Group of Mussel Collectors in rejecting iron sand mining activities. This study uses qualitative methods with data collection techniques through non-participant observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis is carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on conflict theory and a structural functional perspective, WALHI Bengkulu's assistance is understood as a form of social resistance against the dominance of capital interests as well as a mechanism for strengthening the role and collective solidarity of coastal communities. The results show that WALHI Bengkulu's assistance plays an important role in strengthening the critical awareness, organizational capacity, and bargaining power of the women's group of mussel collectors. Forms of assistance include environmental education, legal advocacy, public campaigns, demonstrations, audiences with the government, and alternative economic development. This study concludes that WALHI Bengkulu's assistance contributed significantly to strengthening the collective resistance of coastal women as well as efforts to protect coastal ecosystems and achieve social and environmental justice in Pasar Seluma Village.

Keywords: Mentoring; WALHI; Women with Stubble; Iron Sand Mining; Ecological Conflict

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik sosial dan ekologis akibat rencana penambangan pasir besi oleh PT Faminglevto Bakti Abadi (FBA) di Desa Pasar Seluma, Bengkulu, yang mengancam ekosistem pesisir dan mata pencaharian masyarakat, khususnya kelompok perempuan pengumpul remis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendampingan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bengkulu terhadap Kelompok Perempuan Beremis dalam menolak aktivitas pertambangan pasir besi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi nonpartisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan teori konflik dan perspektif struktural fungsional, pendampingan WALHI Bengkulu dipahami sebagai bentuk perlawanan sosial terhadap dominasi kepentingan kapital sekaligus sebagai mekanisme penguatan peran dan solidaritas kolektif masyarakat pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan WALHI Bengkulu berperan penting dalam memperkuat kesadaran kritis, kapasitas organisasi, dan daya tawar kelompok perempuan beremis. Bentuk pendampingan ini meliputi edukasi lingkungan,

advokasi hukum, kampanye publik, aksi demonstrasi, audiensi dengan pemerintah, serta pengembangan ekonomi alternatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendampingan WALHI Bengkulu berkontribusi signifikan terhadap penguatan perlawanan kolektif perempuan pesisir serta upaya perlindungan ekosistem pesisir dan keadilan sosial lingkungan di Desa Pasar Seluma.

Kata Kunci: Pendampingan; WALHI; Perempuan Beremis; Tambang Pasir Besi; Konflik Ekologis

Pendahuluan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan organisasi advokasi lingkungan yang sejak berdiri pada tahun 1980 berfokus pada kerja advokasi, pendampingan komunitas, serta penguatan keadilan ekologis dan gender, terutama di wilayah pesisir dan pedesaan yang menghadapi ancaman industri ekstraktif (Efendi et al., 2019). Salah satu fokus advokasi WALHI Bengkulu adalah pendampingan masyarakat pesisir Desa Pasar Seluma dalam menolak rencana pertambangan pasir besi oleh PT Faminglevto Bakti Abadi (FBA), yang dinilai mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir dan ruang hidup masyarakat, khususnya perempuan (Perdana, 2024).

Perempuan di Desa Pasar Seluma memiliki peran strategis melalui aktivitas beremis atau pencarian remis yang telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari sistem penghidupan serta kearifan lokal masyarakat pesisir (Kurniawati et al., 2023). Rencana pertambangan pasir besi memunculkan kerentanan sosial dan ekologis yang secara langsung berdampak pada keberlangsungan aktivitas beremis, sehingga mendorong perempuan untuk terlibat aktif dalam gerakan penolakan tambang sebagai bentuk perlindungan ruang hidup mereka (Yunianto, 2009).

Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya diposisikan sebagai kelompok terdampak, tetapi juga sebagai aktor utama dalam gerakan sosial lingkungan (Wulan, 2007). Konflik pertambangan pasir besi di Desa Pasar Seluma mencerminkan pertentangan antara kepentingan kapital dan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya pesisir. Pertambangan pasir besi dengan luas konsesi mencapai 168 hektar dengan area yang membentang sejauh 350 meter ke arah laut dan 350 meter ke arah daratan dari garis pantai pesisir barat Seluma. Penolakan masyarakat tidak semata didorong oleh persoalan kerusakan lingkungan, tetapi juga oleh ketimpangan sosial dan ekonomi yang muncul akibat praktik ekstraksi sumber daya alam yang tidak berpihak pada masyarakat pesisir (Perdana, 2024).

Kondisi tersebut memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam (Mardhatillah & Putra, 2024). Dalam konteks tata kelola lingkungan di Indonesia, kegiatan pertambangan diwajibkan memenuhi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen pengendalian dampak ekologis dan sosial (Yakin, 2017). Namun, lemahnya implementasi prinsip partisipasi masyarakat dalam proses perizinan sering kali memicu konflik lingkungan, sebagaimana tercermin dalam kasus pertambangan pasir besi di Desa Pasar Seluma (Dona et al., 2025).

Situasi ini memperkuat urgensi peran organisasi masyarakat sipil dalam mengawal hak-hak masyarakat terdampak (Adisiswanto, 2025). Pendampingan WALHI Bengkulu terhadap kelompok Perempuan Beremis mencakup advokasi hukum, penguatan kapasitas organisasi, serta perluasan jejaring gerakan penolakan tambang di tingkat lokal dan nasional. Pendampingan ini menjadi strategi penting dalam memperkuat posisi tawar masyarakat pesisir, khususnya perempuan, dalam menghadapi konflik lingkungan yang bersifat struktural (Astuti, 2012).

Melalui pendampingan tersebut, perempuan pesisir memperoleh ruang partisipasi yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan wilayah pesisir (Suprpto & Setyorini, 2023). Secara teoretis, fenomena konflik pertambangan pasir besi di Desa Pasar Seluma dapat dipahami melalui teori konflik, yang melihat konflik sebagai akibat dari ketimpangan relasi kekuasaan antara pemilik modal dan masyarakat lokal, serta teori struktural fungsional yang memandang pendampingan WALHI sebagai mekanisme sosial untuk memperkuat solidaritas dan keberfungsian sistem sosial masyarakat pesisir dalam menghadapi gangguan eksternal (Juwita et al., 2020).

Namun, kajian yang secara spesifik mengkaji pendampingan organisasi lingkungan dalam memperkuat peran perempuan pesisir sebagai agen perubahan sosial-ekologis masih relatif terbatas (Biru et al., 2021). Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pendampingan WALHI Bengkulu terhadap kelompok perempuan beremis dalam menolak tambang pasir besi di Desa Pasar Seluma, serta memahami kontribusi pendampingan tersebut dalam memperkuat peran strategis perempuan sebagai agen perubahan sosial dan ekologis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang gerakan sosial perempuan dan keadilan ekologis (Nagari, 2020). Sementara secara empiris memberikan kontribusi pada pengembangan strategi advokasi lingkungan berbasis komunitas di wilayah pesisir Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui Pendampingan WALHI terhadap kelompok perempuan beremis dalam menolak tambang pasir besi di Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria keterlibatan aktif dalam kegiatan pendampingan dan advokasi WALHI Bengkulu serta pemahaman terhadap kondisi sosial dan lingkungan pesisir, sehingga diperoleh enam informan yang terdiri atas dua orang perwakilan WALHI Bengkulu, dua orang anggota kelompok perempuan beremis, satu orang perangkat desa, dan satu orang masyarakat setempat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi nonpartisipan, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi terhadap arsip kegiatan organisasi serta pemberitaan media yang relevan. Penelitian ini dilaksanakan selama tujuh bulan, yaitu dari Mei hingga Desember 2025. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berulang. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi antar informan agar diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dan Pembahasan

1. Aksi Penyampaian Penolakan Tambang Pasir Besi di Tingkat Lokal

Salah satu bentuk nyata perlawanan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan pasir besi oleh PT. FBA adalah aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Seluma pada Selasa, 1 Maret 2022. Aksi ini diikuti oleh ratusan warga dari enam desa pesisir Seluma yaitu Desa Pasar Seluma, Desa Penago Baru, Desa Penago I, Desa Rawa Indah, Desa Pasar Taloh, dan Desa Margosari. Masyarakat menuntut agar pemerintah segera menghentikan seluruh aktivitas pertambangan karena dinilai telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan perpecahan sosial di tengah warga. Dari hasil observasi nonpartisipan, peneliti melihat bahwa kelompok Perempuan Beremis tidak hanya hadir sebagai peserta aksi, tetapi juga mengambil peran strategis sebagai juru bicara yang menyampaikan tuntutan secara langsung kepada pemerintah daerah.

Menurut Ibu NE selaku sekretaris kelompok perempuan beremis, menyatakan dalam aksi tersebut ia menyampaikan orasi dan menyuarakan keresahan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan pasir besi, khususnya terkait rusaknya ekosistem pesisir dan menurunnya hasil tangkapan remis sebagai sumber penghidupan utama (Wawancara, 18 Mei 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan WALHI mendorong keberanian perempuan untuk berbicara di ruang publik, karena seringkali perempuan cenderung pasif dan hanya mengikuti keputusan laki-laki, namun setelah mendapatkan pendidikan lingkungan dan advokasi, perempuan mulai aktif menyampaikan pendapat dan tuntutan.

Melalui aksi ini, masyarakat menuntut Bupati Seluma untuk segera menghentikan seluruh aktivitas tambang, mengeluarkan alat berat dan peralatan perusahaan dari lokasi, serta menindak tegas PT. FBA secara hukum. WALHI Bengkulu turut hadir mendampingi masyarakat dengan memberikan dukungan advokasi hukum, dan penyusunan strategi agar aksi tersebut dapat berjalan secara kondusif tanpa menimbulkan keributan. Berdasarkan dokumentasi kegiatan yang dikumpulkan peneliti dari berbagai media pemberitaan, WALHI Bengkulu juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan media, sehingga isu penolakan tambang pasir besi memperoleh perhatian luas dari publik dan lembaga berwenang.

Namun, menurut Bapak DF selaku pihak pendamping dari WALHI Bengkulu, menyatakan bahwa perjuangan masyarakat tidak terlepas dari hambatan. Dalam beberapa aksi, masyarakat berupaya untuk berdialog langsung dengan Bupati Seluma, tetapi sering kali tidak mendapat tanggapan atau pejabat terkait tidak berada di tempat (Wawancara, 21 Mei 2025). Kondisi ini menimbulkan kekecewaan dan memperkuat persepsi masyarakat terhadap lemahnya respons pemerintah daerah dalam merespons aspirasi masyarakat pesisir.

Sebagai tindak lanjut dari aksi di tingkat Kabupaten, masyarakat kemudian memperluas ruang advokasinya ke tingkat provinsi melalui aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Bengkulu pada Senin, 4 Juli 2022. Aksi ini dihadiri oleh masyarakat pesisir Seluma, kelompok perempuan beremis, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Bengkulu, dan WALHI Bengkulu sebagai fasilitator utama gerakan. Hasil observasi menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil memperkuat daya tekan aksi serta memperluas jaringan solidaritas lintas kelompok.

Dalam aksi tersebut, massa berharap dapat bertemu langsung dengan Gubernur, Wakil Gubernur, atau Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan tuntutan pencabutan izin pertambangan pasir besi PT. FBA yang memiliki luas sekitar 168 hektare. Namun, pejabat yang dituju tidak berada di tempat, sehingga massa sempat berencana bermalam di halaman Kantor Gubernur sebagai bentuk protes. Situasi ini mencerminkan terbatasnya akses masyarakat pesisir terhadap ruang pengambilan keputusan di tingkat provinsi.

Dari rangkaian aksi di tingkat lokal dan provinsi tersebut, perjuangan masyarakat pesisir Seluma kemudian mencapai momentum yang lebih luas pada tingkat nasional. Puncak dari rangkaian perjuangan masyarakat pesisir Seluma terjadi pada Kamis, 20 Juli 2023, sebanyak 7 perempuan Beremis melakukan perjalanan ke Kota Bengkulu untuk menyuarakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan pasir yang beroperasi di wilayah pesisir barat Kabupaten Seluma. Keberangkatan mereka dimulai dari kantor WALHI Bengkulu sebagai titik kumpul dan pusat koordinasi perjuangan. Para perempuan ini memanfaatkan momen kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Bengkulu untuk menyampaikan langsung keresahan mereka.

Dalam momen tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu EL selaku anggota kelompok perempuan beremis, menyatakan bahwa ia secara langsung berhasil menerobos dan mendekati iring-iringan mobil Presiden dan berbicara langsung di depan

pintu mobil Presiden, dan menyampaikan secara langsung mengenai kerusakan ekosistem pesisir dan hilangnya sumber penghidupan masyarakat akibat aktivitas pertambangan pasir besi dan memohon agar Presiden menghentikan izin operasional PT. FBA demi keselamatan lingkungan dan masa depan masyarakat pesisir. Ibu EL selaku anggota kelompok perempuan beremis juga menyatakan bahwa respons dari Presiden cukup positif, beliau menanyakan lokasi dan nama perusahaan yang dimaksud (Wawancara 18 Mei 2025).

Menurut Bapak DF selaku pihak pendamping dari WALHI Bengkulu, ia mengatakan bahwa WALHI berperan dalam memfasilitasi seluruh proses aksi, mulai dari konsolidasi massa, penyediaan media kampanye, hingga koordinasi dengan media lokal dan nasional (Wawancara, 31 Juli 2025). Dokumentasi pemberitaan media menunjukkan bahwa aksi ini berhasil meningkatkan visibilitas isu penolakan tambang pasir besi di tingkat provinsi serta memperkuat posisi masyarakat pesisir. Selain menjadi sarana penyampaian aspirasi, aksi ini menunjukkan bagaimana pendampingan WALHI Bengkulu mampu menciptakan ruang partisipasi bagi perempuan pesisir untuk terlibat langsung dalam advokasi kebijakan dan perjuangan mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup mereka.

2. Audiensi ke Pemerintah Pusat

Sebagai bagian dari strategi advokasi yang lebih luas, masyarakat Desa Pasar Seluma bersama WALHI Bengkulu melakukan audiensi ke lembaga pemerintah pusat di Jakarta pada Oktober 2022. Audiensi ini berlangsung selama 10 hari dan diikuti oleh 12 peserta, terdiri atas 8 warga Desa Pasar Seluma, 2 warga desa tetangga, serta 2 perwakilan WALHI Bengkulu yaitu Kepala Divisi Advokasi dan Staf Kajian Hukum. Mereka melakukan pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Komnas Perempuan, dan Ombudsman Republik Indonesia.

Berdasarkan data dokumentasi arsip kegiatan WALHI Bengkulu yang diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak DF selaku pihak pendamping dari WALHI Bengkulu menyatakan bahwa masyarakat Desa Pasar Seluma bersama WALHI Bengkulu melakukan audiensi ke lembaga pemerintah pusat di Jakarta pada Oktober 2022. Audiensi ini berlangsung selama 10 hari dan melibatkan 12 peserta, terdiri atas warga desa dan perwakilan WALHI Bengkulu, dengan tujuan menyampaikan penolakan terhadap aktivitas pertambangan pasir besi kepada KLHK, KSP, KKP, Komnas Perempuan, dan Ombudsman Republik Indonesia (Wawancara, 21 Mei 2025).

Audiensi ini menunjukkan meningkatnya kapasitas advokasi masyarakat pesisir, khususnya perempuan beremis, dalam menyampaikan tuntutan secara sistematis dan berbasis pengalaman langsung. Dalam setiap pertemuan, masyarakat menyampaikan dampak ekologis, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan pasir besi PT. FBA, serta menuntut pencabutan izin operasional perusahaan tersebut. Berdasarkan data dokumentasi arsip laporan dari WALHI Bengkulu yang diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak DF selaku pihak pendamping dari WALHI Bengkulu, menyatakan bahwa dalam pertemuan dengan Komnas Perempuan perempuan beremis melaporkan tindakan pelecehan seksual verbal yang dialami oleh kelompok perempuan beremis ketika mereka mendatangi lokasi tambang untuk memantau kondisi lingkungan dan portal akses yang dirusak perusahaan (Wawancara, 18 Mei 2025).

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, 7 Januari 2023 sekitar pukul 11.55 WIB dan dialami oleh lima anggota kelompok perempuan beremis, yaitu SH (29 tahun), EL (35 tahun), ME (30 tahun), ND (40 tahun), dan ZE (34 tahun). Kasus ini memperkuat temuan bahwa konflik sumber daya alam tidak hanya berdampak pada kerusakan

lingkungan, tetapi juga memunculkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan berbasis gender (Suprpto & Setyorini, 2023). Dokumentasi laporan pengaduan dan catatan audiensi menunjukkan bahwa kasus tersebut diterima oleh Komnas Perempuan sebagai bagian dari pola kekerasan terhadap perempuan dalam konteks konflik lingkungan. Selain itu, Berdasarkan data arsip laporan dari WALHI Bengkulu yang diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak DF selaku pihak pendamping dari WALHI Bengkulu, menyatakan bahwa melalui audiensi ini, masyarakat juga menuntut KLHK untuk menolak revisi dokumen lingkungan PT. FBA serta mendesak KKP agar tidak memberikan izin operasional di wilayah laut pesisir Seluma (Wawancara, 21 Mei 2025).

WALHI Bengkulu berperan penting dalam memfasilitasi proses audiensi dengan memastikan tuntutan masyarakat disusun secara jelas, didukung oleh data lapangan, serta disampaikan melalui mekanisme resmi lembaga negara. Hasil wawancara dengan WALHI Bengkulu tersebut menunjukkan bahwa pendampingan difokuskan pada penguatan posisi masyarakat sebagai subjek advokasi, bukan sekadar penerima dampak kebijakan. Audiensi ini menjadi ruang strategis bagi perempuan beremis untuk menyuarakan pengalaman mereka secara langsung di hadapan lembaga negara, sekaligus memperluas jangkauan advokasi dari tingkat lokal ke tingkat nasional.

3. Pelatihan Kerajinan Kelompok Perempuan

Salah satu upaya penguatan ekonomi perempuan di Desa Pasar Seluma dilakukan melalui pelatihan pembuatan kerajinan berbahan cangkang remis dan kerang-kerangan yang melibatkan Kelompok Perempuan Beremis dengan pendampingan langsung dari WALHI Bengkulu. Pelatihan ini dilaksanakan pada Selasa, 25 dan Rabu, 26 Januari 2022 dan ditujukan pada kelompok perempuan beremis yang selama ini menggantungkan penghidupan pada kerang remis. Berdasarkan dokumentasi kegiatan WALHI Bengkulu, pelatihan ini dirancang sebagai bagian dari strategi pendampingan ekonomi untuk mengurangi ketergantungan perempuan terhadap sumber daya pesisir yang terancam oleh aktivitas pertambangan pasir besi (Arsip dokumen WALHI 2023).

Dalam kegiatan ini, WALHI Bengkulu mendorong pemberdayaan perempuan melalui pemanfaatan potensi lokal serta bekerja sama dengan Global Art sebagai pelatih teknis. Hasil observasi nonpartisipan menunjukkan bahwa perempuan beremis terlibat aktif dalam seluruh proses pelatihan, mulai dari pengolahan bahan baku, pembuatan produk, hingga diskusi mengenai strategi pemasaran. Keterlibatan aktif ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan diri dan kapasitas keterampilan perempuan dalam mengelola usaha berbasis sumber daya lokal. Pelatihan kerajinan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai ruang kolektif untuk memperkuat solidaritas kelompok.

Informan menyampaikan bahwa kegiatan ini memberi alternatif sumber pendapatan sekaligus memperkuat posisi perempuan dalam mendukung keberlanjutan perjuangan menolak tambang pasir besi. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu NE selaku sekretaris kelompok perempuan beremis, yang menyatakan bahwa seluruh pendapatan dari hasil kerajinan tidak dibagikan secara individu, melainkan dimasukkan ke dalam kas kelompok untuk mendukung kebutuhan kegiatan dan keberlanjutan program pemberdayaan (Wawancara, 18 Mei 2025).

Selain bekerja sama dengan Global Art sebagai pelatih teknis, kegiatan ini juga menunjukkan adanya kerja sama antara WALHI Bengkulu dan Pemerintah Daerah melalui keterlibatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Seluma. Selain dukungan pemerintah daerah, WALHI Bengkulu turut mempromosikan produk kerajinan melalui berbagai kanal komunikasi dan memperluas pemasaran ke tingkat nasional melalui jejaring WALHI. Produk yang memenuhi standar

dipasarkan melalui OBALIHARA, *marketplace* dan koperasi resmi WALHI yang menampung berbagai produk Wilayah Kelola Rakyat. Dokumentasi pemasaran produk menunjukkan bahwa keterhubungan dengan jejaring nasional memberikan peluang ekonomi yang lebih luas bagi kelompok perempuan beremis serta memperkuat keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Kolaborasi antara kelompok perempuan beremis, WALHI Bengkulu, pemerintah daerah, global art, dan jejaring nasional menunjukkan adanya kontribusi bersama dalam memperkuat ekonomi masyarakat pesisir Desa Pasar Seluma. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan ekonomi perempuan menjadi bagian penting dari strategi advokasi lingkungan, karena mendukung keberlanjutan partisipasi perempuan dalam perjuangan mempertahankan ruang hidup pesisir.

Temuan penelitian ini dapat dipahami melalui Teori Konflik yang menekankan bahwa konflik sosial muncul akibat ketimpangan dalam penguasaan sumber daya antara kelas berkuasa dan kelas tertindas (Alwi, 2016). Dalam konteks Desa Pasar Seluma, PT. FBA merepresentasikan kelas kapitalis yang memiliki modal, sedangkan masyarakat pesisir khususnya kelompok perempuan beremis menjadi kelas tertindas yang kehilangan akses terhadap ruang hidup, ekosistem, dan sumber nafkah. Relasi ini mencerminkan dominasi kapital, di mana pihak perusahaan sebagai kelas menempati posisi dominan, sementara masyarakat hanya memiliki kekuatan solidaritas dan perlawanan kolektif.

Aksi penolakan yang dilakukan masyarakat dapat dipahami sebagai bentuk kesadaran kelas, yaitu kesadaran akan posisi mereka sebagai kelompok yang dirugikan (Fadilah, 2021). Keterlibatan aktif kelompok perempuan beremis menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya pihak yang terdampak, tetapi juga aktor utama dalam perjuangan ekologis. Pendampingan WALHI Bengkulu berperan penting dalam mengubah posisi perempuan dari pihak yang hanya terdampak menjadi aktor yang aktif dalam advokasi penolakan tambang (Mariyawati et al., 2023). Bentuk pendampingan yang paling berpengaruh terlihat pada tiga hal, yaitu meningkatkan pemahaman perempuan, memperkuat kemampuan mereka dalam menyampaikan aspirasi, dan membuka akses ke ruang pengambilan kebijakan.

Melalui kegiatan pendidikan lingkungan dan diskusi bersama, WALHI membantu perempuan beremis memahami hubungan antara kerusakan lingkungan, proses perizinan tambang, dan ketimpangan kekuasaan antara perusahaan dan masyarakat. Pemahaman ini mendorong keberanian perempuan untuk berbicara di ruang publik, baik dalam aksi demonstrasi maupun audiensi dengan pemerintah. Selain itu, WALHI Bengkulu secara konkret memfasilitasi perempuan dalam menyusun tuntutan kebijakan, membangun narasi advokasi berbasis pengalaman hidup perempuan pesisir, serta menghubungkan mereka dengan media dan lembaga negara.

Pendampingan ini terbukti meningkatkan legitimasi suara perempuan di ruang publik, terlihat dari keterlibatan mereka dalam audiensi tingkat provinsi hingga nasional, termasuk keberhasilan perempuan beremis menyampaikan langsung aduan kepada Presiden. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran posisi tawar perempuan, dari aktor lokal yang terpinggirkan menjadi bagian dari aktor politik yang diakui. Dalam kerangka Marxian, perjuangan perempuan beremis dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan struktural terhadap sistem kapitalisme yang mengeksploitasi alam dan manusia secara bersamaan.

Kerusakan lingkungan tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekologis, tetapi juga sebagai ancaman terhadap keberlangsungan hidup keluarga dan komunitas pesisir. Peran WALHI Bengkulu tidak bersifat menggantikan perjuangan masyarakat, melainkan berfungsi sebagai fasilitator struktural yang memperkuat posisi perempuan dalam menghadapi relasi kuasa yang timpang. Pendampingan ini memungkinkan perempuan

membangun solidaritas kelompok, serta mengakses mekanisme hukum. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitri & Akbar (2017) di Pegunungan Kendeng yang menunjukkan peran WALHI dalam mendampingi perempuan petani mempertahankan ruang hidup dari ancaman industri ekstraktif. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menempatkan perempuan pesisir beremis sebagai aktor utama gerakan lingkungan di wilayah pesisir, sebuah konteks yang relatif masih terbatas dalam kajian sosiologi lingkungan.

Perbedaan juga terlihat dibandingkan penelitian Mariati (2023) di Tumpang Pitu, Banyuwangi, di mana gerakan perempuan lebih bersifat spontan dan berbasis solidaritas tanpa pendampingan formal lembaga. Sementara itu, penelitian Cusdiawan (2022) di Indramayu menunjukkan kesamaan dalam pendampingan LSM, namun dengan pendekatan jejaring transnasional. Penelitian ini menegaskan bahwa pendampingan kelembagaan yang terstruktur oleh WALHI Bengkulu memiliki dampak signifikan dalam membangun keberlanjutan gerakan perempuan pesisir serta memperkuat posisi tawar mereka dalam konflik lingkungan jangka panjang.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan WALHI Bengkulu berperan penting dalam memperkuat peran dan posisi tawar Kelompok Perempuan Beremis di Desa Pasar Seluma dalam menolak aktivitas pertambangan pasir besi PT. Faminglevto Bakti Abadi. Bentuk pendampingan yang paling signifikan meliputi advokasi hukum, kampanye publik, penguatan ekonomi kelompok perempuan, serta fasilitasi aksi kolektif yang mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam perjuangan mempertahankan ruang hidup pesisir. Faktor pendukung utama pendampingan ini adalah solidaritas kolektif perempuan dan masyarakat serta dukungan organisasi masyarakat sipil seperti WALHI, sedangkan hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan akses terhadap ruang pengambilan keputusan, dan ketimpangan relasi kuasa dengan aktor industri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendampingan yang berkelanjutan serta dukungan kebijakan pemerintah untuk menjamin perlindungan ruang hidup dan partisipasi perempuan pesisir dalam pengelolaan sumber daya alam.

Daftar Pustaka

- Adisiswanto, A. E. (2025). Optimalisasi Tata Kelola Pajak Desa melalui Pendampingan Administrasi Keuangan Berbasis Transparansi dan Partisipasi Masyarakat. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(2).
- Alwi, H. (2016). *Pengantar Studi Konflik Sosial*. Mataram: Institusi Agama Islam Negeri.
- Astuti, T. M. P. (2012). Ekofeminisme Dan Peran Perempuan Dalam Lingkungan. *Indonesian Journal of Conservation*, 1(1).
- Biru, R. C. B., Fahmi, R., & Sulistino, E. (2021). Pengusaha Perempuan Sebagai Agen Perubahan : Studi Komparasi Peran Perempuan Sebagai Wirausaha Sosial di Negara Berkembang. *NOKEN Jurnal Pengelolaan Pendidikan*, 2(1), 11-22.
- Cusdiawan, C., Abdoellah, O. S., & Manan, F. (2022). Gerakan Perempuan Subaltern Ekofeminisme dalam Melawan Pembangunan PLTU 2 Indramayu. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3).
- Dona, R., Mukhlis, M., & Budiono, P. (2025). Ketimpangan Kekuasaan Dalam Konflik Agraria : Menelaah Resolusi Konflik Berbasis Teori Foucault di Kabupaten Tebo. *Journal Publicuho*, 8(1), 71-384.
- Efendi, H. N., Yulianto, Y., & Prihantika, I. (2019). Dinamika Peran Civil Society Dalam Ruang Publik: Sudi WALHI. *Administrativa Jurnal Birokrasi, Kebijakan, Dan Pelayanan Publik*, 1(1), 19-28.

- Fadilah, G. (2021). Implikasi Teori-Teori Konflik terhadap Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi. *Journal of Society and Development*, 1(1), 11-15.
- Fitri, A. I., & Akbar, I. (2017). Gerakan Sosial Perempuan Ekofeminisme Di Pegunungan Kendeng Provinsi Jawa Tengah Melawan Pembangunan Tambang Semen. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 83-102.
- Juwita, R., Firman, F., Rusdinal, R., & Aliman, M. (2020). Meta Analisis: Perkembangan Teori Struktural Fungsional dalam Sosiologi Pendidikan. *Jurnal Prespektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 3(1), 1-8.
- Kurniawati, I., Guntur, M., & Agusdianita, N. (2023). Eksplorasi Etnomatematika di Bengkulu sebagai Sumber Belajar Matematika pada Materi Penyajian Data Bentuk Diagram Batang. *EduBase: Journal of Basic Education*, 4(1).
- Mardhatillah, M., & Putra, H. P. (2024). Peran Masyarakat dalam Pelanggaran Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya oleh Aktivitas Pertambangan Pasir Besi di Desa Pasar Seluma. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 8321-8329.
- Mariati, T., Yulianti, Y., & Sukesu, K. (2023). Emas Di Gunung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi Women's Resistance To Mining Activities Gold in Mount Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, 7(1).
- Mariyawati, M., Wulan, T. R., Wuryaningsih, T., & Sutoyo, I. S. (2023). Pendampingan Terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(2).
- Nagari, H. P. (2020). Gerakan Sosial Ekofeminisme Melawan Penambangan Marmer di Gunung Mutis Nusa Tenggara Timur. *International Journal Of Demos*, 2(1), 58-67.
- Perdana, D. D. (2024). The Role of Mass Media to Prevent Potential Natural Disasters: a Study on the News of Iron. *Jurnal Spektrum Komunikasi (JSK)*, 12(2), 216-224.
- Suprpto, S., & Setyorini, A. H. (2023). Perjuangan Perempuan Dalam Novel Perempuan di Titik Nol Karya Nawal El-Saadawi: Kajian Feminisme. *Journal of Language and Literature Studies*, 3(2), 148-157.
- Wulan, T. R. (2007). Ekofeminisme Transformatif: Alternatif Kritis. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, Dan Ekologi Manusia*, 1(1).
- Yakin, S. K. (2017). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan. *Badamai Law Journal*, 2(1).
- Yunianto, B. (2009). Pengolahan Pasir Besi di Pantai Selatan Kulon. *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara*, 5(1), 1-16.